

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

UMKM memiliki potensi yang begitu besar bagi peningkatan perekonomian rakyat, namun kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, modal dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan yang biasa dialami oleh UMKM di Jepara, diperlukan adanya strategi kebijakan dari pemerintah yang pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi.

Strategi pengembangan UMKM dilakukan agar UMKM yang sudah ada dapat menciptakan usaha-usaha baru yang profesional dan berjiwa wirausaha dengan menciptakan iklim yang kondusif agar keberhasilan UMKM berdasarkan kemampuan pengusaha UMKM untuk bersaing dengan pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya dalam memanfaatkan peluang.

Berdasarkan model dan dimensi strategi pemerintahan, hasil analisa observasi serta wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh peneliti berpendapat bahwa strategi pengembangan UMKM di Jepara termasuk dalam model strategi progresif. Strategi yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan memiliki dampak positif adalah:

1. Integrasi ke depan

2. Penetrasi pasar
3. Pengembangan pasar
4. Pengembangan produk
5. Diversifikasi

Hal ini dibuktikan dengan jumlah industri di tahun 2018 mencapai 19.551 industri. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan rata-rata yaitu 0,03 persen/tahun dari tahun 2016-2018. Serta meningkatnya kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Jepara. Meningkatnya PDRB Kabupaten Jepara berbanding lurus dengan kemampuan sumber daya ekonomi serta laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara.

Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki peran sebagai fasilitator yakni memfasilitasi apa yang dibutuhkan pelaku UMKM, peran sebagai regulator yakni membuat kebijakan yang mempermudah usaha UMKM, dan peran sebagai katalisator yakni mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi fast moving enterprise. Peran Pemerintah (fasilitator, regulator, dan katalisator) semua aspek tersebut terpenuhi dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas sasaran pembangunan. Dokumen Renstra telah memuat tentang kebijakan yang diatur di daerah maupun ditingkat Provinsi dan Pusat (Kementerian Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi) serta target sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya, sebagai acuan perencanaan penganggaran tahunan pada saat

penyusunan Rencana Kerja Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara. Terdapat 11 Program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara untuk periode 2017-2022, yaitu:

1. Pelatihan Kemasan (*Packaging*).
2. Penataan Kelembagaan Pengembangan Manajemen Pengelolaan UMKM.
3. Identifikasi dan Validasi data UMKM.
4. Pelatihan Pemasaran melalui *E-Commerce* bagi Pelaku Usaha Kecil.
5. Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Daerah.
6. Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM melalui Peningkatan Keterampilan Kewirausahaan.
7. Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM melalui Peningkatan Usaha.
8. Pelatihan Keterampilan dan Pengembangan Desain Produk.
9. Sosialisasi dan Evaluasi Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
10. Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil (MUK).
11. Fasilitasi Sertifikat Halal.

Hambatan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan strategi terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal.

Faktor internal:

1. Kurangnya SDM dalam Satuan Pelaksana Strategi.
2. Sarana dan Prasarana belum memadai.

Faktor eksternal:

1. Jadwal pelaksanaan strategi kebijakan yang berbenturan dengan urusan kedinasan mendesak (*urgent*).
2. Penyesuaian jadwal dengan narasumber.

4.2 Saran

Saran yang penulis ingin sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi terkait dengan strategi integrasi ke belakang dan integrasi horizontal adalah menjalin kerjasama dengan piha penyedia jasa pinjaman modal sehingga pelaku UMKM di Kabupaten Jepara lebih mudah mendapat akses pinjaman modal.

Terkait dengan pelaksanaan strategi kebijakan, pemerintah seharusnya menambah personil atau anggota lapangan Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi khususnya di Bidang UKM. Menurut penulis, 6 orang untuk menangani pelaksanaan kebijakan UMKM se-Kabupaten Jepara dirasa sangat kurang. Bidang UKM harus membagi anggotanya sebagai pelaksana strategi kebijakan dan sebagai pelayanan publik di kantor. Ada baiknya menambah masing-masing 1 staff di setiap seksi Bidang UKM, sehingga ketika melaksanakan strategi kebijakan ada staf yang tinggal di kantor untuk pelayanan publik.

Terkait peningkatan sarana dan prasarana yang ada di kantor Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi khususnya di Bidang UKM. Ada baiknya untuk meningkatkan sarana prasarana yaitu adanya ruang tunggu atau

tempat khusus untuk pelayanan masyarakat. Serta adanya sarana pendukung lain agar masyarakat lebih merasa nyaman saat mereka mengurus perijinan ataupun sekadar konsultasi di Kantor Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi di Bidang UKM.